



147

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 141 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2006
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006, telah diatur Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap format sarana pemungutan retribusi berupa formulir yang digunakan dalam rangka pemungutan retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sambil menunggu penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Peraturan Gubernur atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 126 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



MUHAYAT
NIP 195104271973031003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 141 TAHUN 2010
Tanggal 16 Agustus 2010

BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN SEBAGAI SARANA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH OLEH KOORDINATOR PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH

	NAMA/JUDUL FORMULIR	MODEL/NOMOR
1	Pendataan Wajib Retribusi Daerah	BPKD 001 Ret.
2	Permohonan Jasa Pelayanan	BPKD 002 Ret.
3	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)	BPKD 003 Ret.
4	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan (SKRD Jabatan)	BPKD 004 Ret.
5	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan (SKRD Tambahan)	BPKD 005 Ret.
6	Surat Permohonan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	BPKD 006 Ret.
7	Keputusan Kepala SKPD/UK-SKPD Tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	BPKD 007 Ret.
8	Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah	BPKD 008 Ret.
9	Surat Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah (SPARD)	BPKD 009 Ret.
10	Surat Permohonan Penundaan Pembayaran	BPKD 010 Ret.
11	Keputusan Kepala SKPD/UK-SKPD Tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah	BPKD 011 Ret.
12	Surat Pernyataan Penundaan Pembayaran	BPKD 012 Ret.
13	Surat Tanda Setor Retribusi Daerah (STSRD)	BPKD 013 Ret.
14	Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran	BPKD 014 Ret.
15	Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB)	BPKD 015 Ret.
16	Surat Peringatan	BPKD 016 Ret.
17	Surat Teguran	BPKD 017 Ret.
18	Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)	BPKD 018 Ret.
19	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah Dengan Menggunakan Ketetapan	BPKD 019Ret.
20	Laporan Penerimaan Retribusi Daerah dengan menggunakan Dokumen yang Dipersamakan	BPKD 020 Ret.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SKPD/UK-SKPD :

PENDATAAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI :

A IDENTITAS SUBJEK RETRIBUSI	
1. a. Nama (Penanggung Retribusi) : f. Kode Pos :
b. Alamat :
c. Kelurahan :
d. Kecamatan :
e. Kota Administrasi :
2. a. Nama Usaha : c. Kode Pos :
b. Alamat :
B DATA OBJEK RETRIBUSI DAERAH	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

Demikian data ini diisi dengan sebenarnya.

Jakarta,

Mengetahui/Menyetujui
Wajib Retribusi

Petugas Pendata,

Nama jelas

Nama jelas

Keterangan:

- Lembar ke-1 (putih) : SKPD/UK- SKPD

- Lembar ke-2 (biru) : Wajib Retribusi



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal : Permohonan Jasa Pelayanan

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
 Ibukota Jakarta
 c.q. Kepala SKPD/UK-SKPD

.....
 di Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
A l a m a t :

Bertindak untuk dan atas nama

Orang pribadi/Badan :
A l a m a t :

dengan ini mengajukan untuk mendapatkan :

Jasa Pelayanan :
Alamat Objek :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan persyaratan permohonan sebagai berikut.

1.
2.
3.
4.
5.

Jakarta,

Pemohon,

Nama jelas



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Model BPKD 003 Ret.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) No. Form :
Nomor : SKPD/UK-SKPD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang jasa pelayanan :

Berdasarkan Peraturan Daerah No Tahun dan atas permohonan Saudara agar segera menyetorkan uang pada Rekening Kas Umum Daerah / Kas Umum Daerah.

Jumlah : Rp

Terbilang :

untuk pembayaran Pokok Retribusi dengan perincian sebagai berikut.

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah			Rp
- Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani - Jatuh Tempo Pembayaran tanggal - Keterlambatan penyetoran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.		Jakarta, Kepala SKPD/UK-SKPD _____ NIP	
Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima Tanggal Tempat Penerima Pembayaran _____ Nama jelas	, Tanggal..... Penyetor, _____ Nama jelas	
# coret yang tidak perlu			
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas			

- Lembar ke-1 (putih) : Untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 (kuning) : Untuk Tempat Penerima Pembayaran
- Lembar ke-3 (Merah) : Untuk SKPD/UK-SKPD Pemungut Retribusi
- Lembar ke-4 (hijau) : Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Lembar ke-5 (biru) : Peringgal pada SKPD/UK-SKPD



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH JABATAN No. Form :
(SKRD JABATAN)

Nomor : SKPD/UK-SKPD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan penelitian yang telah kami lakukan ternyata Saudara tidak mengajukan permohonan kepada Gubernur untuk mendapatkan jasa pelayanan, maka sesuai dengan Peraturan Daerah No. Tahun Pasal dan berdasarkan hasil perhitungan ditetapkan untuk masa retribusi bulan s.d. Tahun sebagai berikut.

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi
Jumlah Pokok Retribusi			Rp
Jumlah Sanksi Administrasi (denda 100%)			Rp
Jumlah Retribusi Terutang			Rp
<ul style="list-style-type: none"> - Harus disetor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal SKRD ini ditandatangani - Jatuh Tempo Pembayaran tanggal - Keterlambatan penyeteran dari batas waktu yang ditentukan dikenakan denda Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan. 		Jakarta, Kepala SKPD/UK-SKPD <div style="text-align: center;">_____</div> NIP	
Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima Tanggal <div style="text-align: center;">Tempat Penerima Pembayaran</div> <div style="text-align: center;">_____</div> Nama jelas	, Tanggal..... <div style="text-align: center;">Penyeter,</div> <div style="text-align: center;">_____</div> Nama jelas	
# coret yang tidak perlu			
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas			

- Lembar ke-1 (putih) : Untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-2 (kuning) : Untuk Kantor Penerima Pembayaran
 Lembar ke-3 (Merah) : Untuk SKPD/UK-SKPD Pemungut Retribusi
 Lembar ke-4 (hijau) : Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Lembar ke-5 (biru) : Bertinggal pada SKPD/UK-SKPD



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pembayaran Angsuran
Retribusi

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
c.q. Kepala SKPD/UK-SKPD
.....
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :

dengan ini saya mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran Retribusi
..... sebanyak kali angsuran sebesar
Rp/bulan
atas utang retribusi berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD
Tambahkan Nomor tanggal
sebesar Rp

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan sebagai berikut.

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh tanggung jawab.

Jakarta,

Pemohon,

Nama jelas

*) coret yang tidak perlu

Beri tanda ✓ pada yang sesuai

CATATAN :

Sesuai ketentuan yang berlaku angsuran hanya dapat diberikan paling banyak 4 (empat) kali cicilan dan harus dibayar setiap bulan dengan jumlah yang sama besar



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/UK-SKPD

NOMOR

TENTANG

**PERSETUJUAN/PENOLAKAN *)PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA SKPD/UK-SKPD**

- Membaca** : Surat permohonan pembayaran secara Angsuran Retribusi Nomor tanggal yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- Menimbang** : a. bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk mengangsur pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi *) ketentuan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala tentang Persetujuan/Penolakan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI.
- KESATU** : Persetujuan/Penolakan *) permohonan angsuran pembayaran retribusi kepada
- N a m a** :
- J a b a t a n** :
- A l a m a t** :
- KEDUA** : Persetujuan permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sebanyak kali angsuran selama bulan dalam jumlah yang sama besar dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran Angsuran*)
- KETIGA** : Penolakan permohonan pembayaran secara angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan permohonan Saudara*)
- KEEMPAT** : Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp*)
- KELIMA** : Berdasarkan penolakan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Saudara diwajibkan membayar retribusi terutang secara sekaligus sebesar Rp*)
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SKPD/UK-SKPD

NIP

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-2 : untuk SKPD/UK-SKPD
Lembar ke-3 : untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :

Ala m a t :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD *) Nomor tanggal Secara angsuran sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD/UK-SKPD Retribusi Nomor tanggal tentang Pembayaran Angsuran Retribusi dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

Angsuran ke	Tanggal Pembayaran	Besarnya Angsuran (Rp)
I		
II		
III		
IV		

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SKPD/UK-SKPD

.....

Jakarta,

Yang membuat pernyataan
Wajib Retribusi,

Meterai
Rp. 6.000,-

NIP

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 (putih) : untuk SKPD/UK-SKPD
Lembar ke-2 (kuning) : untuk Wajib Retribusi
Lembar ke-3 (merah) : untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah

No. Agenda :
Tanggal :
Paraf :



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SURAT PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI No. Form :
DAERAH (SPARD)

Nomor : SKPD/UK-SKPD :

Kepada Yth.

Nama :

Alamat :

Bidang jasa pelayanan :
Berdasarkan Ketetapan Retribusi dan SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD *) Nomor
tanggal dan Keputusan Kepala SKPD/UK-SKPD
Nomor tanggal agar segera menyetorkan uang pada Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah/Kantor Pembantu *)

Jumlah : Rp

Terbilang :

Untuk pembayaran angsuran retribusi dengan perincian sebagai berikut.

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Jumlah Pokok Retribusi	Angsuran ke
Jumlah			Rp	
Harus disetor sesuai dengan tanggal pembayaran yang tercantum dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Pembayaran Angsuran Nomor		Jakarta, Kepala SKPD/UK-SKPD _____ NIP		
Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima Jakarta, Tempat Penerima Pembayaran _____ NIP		Jakarta, Penyetor, _____ Nama jelas		
*) coret yang tidak perlu				
Tempat teraan Kas Register/Tanda Lunas				

- Lembar ke-1 (putih) : untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-2 (kuning) : untuk Tempat Penerima Pembayaran
 Lembar ke-3 (merah) : untuk SKPD/UK-SKPD
 Lembar ke-4 (hijau) : Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Penundaan Pembayaran
Retribusi

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
c.q. Kepala SKPD/UK-SKPD
.....
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
Bertindak atas nama
Orang pribadi/Badan :
A l a m a t :

Bersama ini kami mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Retribusi atas
utang retribusi berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan
Nomor tanggal sebesar Rp

Sebagai bahan pertimbangan kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1.
2.
3.
4.
5.

Demikian permohonan ini disampaikan dengan sebenarnya dan penuh
tanggung jawab.

Jakarta,

Pemohon,

Nama jelas

Beri tanda ✓ pada yang sesuai



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SKPD/UK-SKPD.....

NOMOR

TENTANG

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
PERSETUJUAN/PENOLAKAN*) PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI DAERAH
KEPALA SKPD/UK-SKPD**

- Menimbang :**
- a. bahwa setelah diadakan penelitian ternyata alasan-alasan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sebagaimana tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD telah memenuhi/tidak memenuhi*) ketentuan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala tentang Persetujuan/Penolakan Penundaan Pembayaran Angsuran Retribusi Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA TENTANG PERSETUJUAN/PENOLAKAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ANGSURAN RETRIBUSI.
- KESATU :** Menyetujui/Menolak*) permohonan angsuran pembayaran retribusi
- N a m a :**
- Jabatan :**
- A l a m a t :**
- KEDUA :** Menyetujui/menolak penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dibayar sekaligus sebesar Rp paling lambat tanggal dan dituangkan dalam Surat Pernyataan Pembayaran *)
- KETIGA :** Penolakan permohonan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan pertimbangan atas alasan permohonan *)
- KEEMPAT :** Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, besamya angsuran yang harus dibayar setiap bulan sebesar Rp*)
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA SKPD/UK-SKPD

.....

NIP

*) coret yang tidak perlu

Lembar ke-1 : untuk Wajib Retribusi

Lembar ke-2 : untuk SKPD/UK-SKPD

Lembar ke-3 : untuk Surat Pernyataan Pembayaran Daerah



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Wajib Retribusi :

Alamat :

Pekerjaan/Jabatan :

Dengan ini menyatakan/berjanji untuk membayar retribusi terutang yang tercantum dalam SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan/STRD *) Nomor tanggal(terlampir) Secara sekaligus sesuai dengan Keputusan Kepala SKPD/UK-SKPD Nomor tanggal tentang Penundaan Pembayaran Retribusi Daerah dengan batas akhir pembayaran tanggal

Jumlah Retribusi yang harus dibayar sebesar Rp

Terbilang

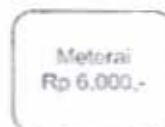


Demikian surat pernyataan ini dibuat dan jika kewajiban pembayaran retribusi tersebut di atas tidak dipenuhi, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala SKPD/UK-SKPD

.....

Jakarta,
Yang membuat pernyataan
Wajib Retribusi,



NIP

.....

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 : Untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 : Untuk SKPD/UK-SKPD
- Lembar ke-3 : Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah

No. Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

SURAT TANDA SETORAN (STS)

Nomor :

Kepada Yth

Kantor /Cabang Kantor Pebendaharaan dan Kas :
Daerah

Alamat :

Harap menerima uang sebesar Rp



Terbilang

:

Dari Pemegang Kas

Nama :

Dinas/Unit Kerja :

Alamat :

Sebagai Penyetoran :

No	Kode Rekening	Jenis Retribusi	Seri/Nomor (Lbr)	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Uang (Rp)
Jumlah					
Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima		Mengetahui : Atasan Langsung Bendahara Penerimaan SKPD/UK-SKPD		Jakarta,	
Tempat Penerima Pembayaran			Penyetor, Bendahara Penerimaan	
NIP.....		NIP.....		NIP.....	
Tempat Teraan Kas Register					

Lembar ke-1 (putih) : untuk Bendahara Penerimaan
Lembar ke-2 (kuning) : untuk Tempat Penerima Pembayaran
Lembar ke-3 (merah) : untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Permohonan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran

Kepada

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
c.q. Kepala SKPD/UK-SKPD.....
.....
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Pekerjaan/Jabatan :
Nama Perusahaan :
A l a m a t :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kelebihan pembayaran atas utang retribusi berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan Nomor tanggal sebesar Rp

Retribusi terutang sebagaimana tersebut di atas telah kami bayar sebesar Rp maka atas kelebihan pembayaran tersebut, kiranya dapat dikembalikan/digunakan untuk melunasi retribusi lain yang terutang/diperhitungkan untuk pembayaran masa retribusi berikutnya *)

Demikian permohonan ini saya ajukan sesuai dengan bukti terlampir.

Jakarta,
Pemohon
Wajib Retribusi,

Nama jelas

*) coret tang tidak perlu

Beri tanda ✓ pada yang sesuai

No. Agenda	:	
Tanggal	:	
Paraf	:	



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor :
 Form :
 Nomor : SKPD/UK-SKPD :
 Tanggal :

**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI
DAERAH LEBIH BAYAR (SKRDLB)**

Jasa	Pelayanan	Kepada
.....		Yth. Nama :
		Jabatan :
		Alamat :

Berdasarkan surat permohonan Saudara tanggal Nomor mengenai kelebihan pembayaran retribusi dan setelah diperhitungkan kembali terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor tanggal yang telah Saudara bayar dengan nomor ayat dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d. Tahun sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang	Rp
Jumlah Pembayaran Retribusi	Rp (-)
Jumlah Retribusi Lebih Bayar	Rp
Imbalan Bunga 2% x bulan x Rp	Rp (+)
Jumlah Retribusi yang dikembalikan	Rp

Terbilang :



Untuk kelebihan pembayaran tersebut, dapat langsung dipehitungkan *)

- a. Untuk melunasi retribusi lain yang terutang
- b. Untuk pembayaran masa retribusi berikutnya
- c. Untuk dilakukan pengembalian

Demikian pemberitahuan ini agar Saudara maklum dan saya ucapkan terima kasih.

Jakarta,

KEPALA SKPD/UK-SKPD

.....

NIP

Lembar ke-1 (putih) : untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-2 (kuning) : untuk SKPD/UK-SKPD
 Lembar ke-3 (merah) : untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah
 Lembar ke-4 (biru) : untuk Bendahara Pengeluaran



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Kepada

Yth.

.....

di

Jakarta

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

Jenis Retribusi	Masa Retribusi	Retribusi terutang pada SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan *) No.	Jumlah Retribusi (Rp)	Tanggal Jatuh Tempo

Dengan diterbitkannya surat peringatan ini, saya minta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya (.....) hari setelah tanggal Surat Peringatan ini dikeluarkan.

Jakarta,

KEPALA SKPD/UK-SKPD

NIP

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 (putih) : untuk Wajib Retribusi
 Lembar ke-2 (kuning) : untuk SKPD/UK-SKPD
 Lembar ke-3 (hijau) : untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Meski BPKD 017 Ret.

Kepada

Yth.

di

Jakarta

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Berdasarkan hasil penelitian pada tata usaha, sampai dengan saat ini Saudara belum menyelesaikan pembayaran retribusi yang terutang sebagai berikut.

Jenis Retribusi	SKRD/SKRD Jabatan/SKRD Tambahan *) No (Rp)	Sanksi Keterlambatan membayar 2%/bulan (Rp)	Jumlah Retribusi yang harus dibayar (Rp)

Dengan diterbitkannya surat teguran ini, Saudara telah dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah retribusi terutang. Oleh karena itu saya minta agar Saudara segera melunasi retribusi yang terutang tersebut di atas selambat-lambatnya
(.....) hari setelah tanggal Surat teguran ini dikeluarkan.

Jakarta,

KEPALA SKPD/UK-SKPD

NIP

*) coret yang tidak perlu

- Lembar ke-1 (putih) : untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 (kuning) : untuk SKPD/UK-SKPD
- Lembar ke-3 (hijau) : untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

Model BPKD 018 Ret.

Nomor :
Form :
Nomor : SKPD/UK-SKPD :
Tanggal :

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
(STRD)

Jasa Pelayanan Kepada
.....
Yth. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Berdasarkan data yang dinilai, ternyata Saudara tidak/belum/kurang membayar retribusi yang terutang dalam SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan Nomor tanggal, dengan ini diberitahukan bahwa hasil perhitungan untuk masa retribusi bulan s.d. Tahun Sebagai berikut.

Jumlah Retribusi Terutang Rp
Jumlah Pembayaran Retribusi Rp (-)
Tidak/Kurang Bayar Rp
Sanksi Administrasi 2% x bulan x Rp Rp (+)
Jumlah Retribusi yang harus dibayar Rp

Terbilang :

Untuk menghindari pelaksanaan penagihan sesuai dengan ketentuan, saya minta agar Saudara segera melunasi kewajiban pembayaran retribusi

Jakarta,
KEPALA SKPD/UK-SKPD

NIP

Uang sejumlah tersebut di atas telah diterima,
Jakarta,
Tempat Penerima Pembayaran

Jakarta,
Penyetor,

.....
Tempat teraan kas register/tanda lunas

- Lembar ke-1 (putih) : Untuk Wajib Retribusi
- Lembar ke-2 (kuning) : Untuk Tempat Penerima Pembayaran
- Lembar ke-3 (Merah) : Untuk SKPD/UK-SKPD
- Lembar ke-4 (hijau) : Untuk Badan Pengelola Keuangan Daerah
- Lembar ke-5 (biru) : Peninggal pada SKPD/UK-SKPD

